

**ANALISIS HUKUM PENGHAPUSAN KEWAJIBAN LAPORAN  
SUMBANGAN DANA KAMPANYE SEBAGAI PENGHAMBAT  
OPTIMALISASI TRANSPARANSI AKUNTABILITAS PEMILU  
INDONESIA**

**ABSTRAK**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menghapus Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) karena dianggap tidak diatur secara eksplisit dalam UU Pemilu. Hal ini menuai kritik dari para pengamat politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penghapusan LPSDK terhadap transparansi, akuntabilitas, mekanisme dan penegakan hukum pelanggaran dana kampanye. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penghapusan LPSDK membuat tidak optimalnya penerapan transparansi dan akuntabilitas pada pendaan kampanye Pemilu. Meskipun terdapat berbagai peraturan tentang Pemilu yang mengatur pelanggaran dana kampanye, jika pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran peraturan lain, maka hal tersebut tidak akan dianggap sebagai pelanggaran Pemilu dan penanganannya diserahkan kepada instansi yang berwenang. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu untuk memaksimalkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan penegakan hukum yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran dana kampanye. Dengan demikian, diharapkan tercipta kepastian hukum dan terselenggaranya pemilu yang adil dan bersih.

**Kata Kunci: Akuntabilitas; Kampanye; Pemilu; Transparansi dan Tindak Pidana Pemilu**

**LEGAL ANALYSIS OF THE ELIMINATION OF CAMPAIGN FUND  
DONATION REPORTING OBLIGATIONS AS AN OBSTACLE TO THE  
OPTIMIZATION OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN  
INDONESIAN ELECTIONS**

**ABSTRACT**

*Komisi Pemilihan Umum (KPU) intends to abolish Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) because it's deemed not to be explicitly regulated in the Election Law. This has drawn criticism from political observers. This research aims to analyze the impact of eliminating LPSDK on transparency, accountability, mechanisms, and law enforcement of campaign finance violations. The research uses normative juridical methods. The findings revealed that the elimination of LPSDK has compromised the implementation of transparency and accountability in election campaign financing. Although various regulations within election law govern campaign finance violations, if a violation falls under another regulatory framework, it is not considered an election offense, and its handling is delegated to the competent authority. Therefore, it's necessary to improve election law to maximize transparency and accountability, ensuring clear and firm law enforcement against campaign finance violations. This is expected to establish legal certainty and facilitate fair and clean elections.*

**Keyword:** *Accountability; Campaigns, Elections; Transparency and Election Crimes*